

## BAB II

### KONDISI SOSIAL-POLITIK DI PRIANGAN TAHUN 1920

#### 2.1. Letak dan Kondisi Geografis Priangan

Priangan<sup>37</sup> merupakan suatu wilayah keresidenan yang berada di tatar Sunda tepatnya di pulau Jawa bagian barat. Wilayah Priangan berbatasan dengan Batavia dan Cirebon di sebelah utara. Sebelah timur berbatasan dengan Cirebon dan Banyumas. Sebelah barat berbatasan dengan Banten. Sebelah selatan dan sebelah barat daya berbatasan dengan Samudera Hindia.<sup>38</sup>

Wilayah Priangan merupakan wilayah bagian kekuasaan dari kerajaan Sumedang Larang sejak tahun 1579. Raden Aria Suriadiwangsa, penguasa Sumedang Larang menyerahkan wilayah kekuasaannya kepada kesultanan Mataram Islam sekitar tahun 1620 sehingga Priangan termasuk ke dalam wilayah kesultanan Mataram Islam. Sejak kedatangan Belanda ke Nusantara, Belanda mencaplok wilayah-wilayah yang memang dapat menguntungkan mereka salah satunya wilayah dari kesultanan Mataram Islam yaitu Priangan. Pada awal abad 19, seluruh wilayah Jawa bagian Barat telah dikuasai oleh Belanda.<sup>39</sup>

Pada masa pemerintahan Gubernur Jenderal H.W. Daendels (1808-1811), pulau Jawa dibagi menjadi 9 *prefektur*. Setiap *prefektur* memiliki seorang

---

<sup>37</sup> Kata Priangan memiliki beberapa arti. Pertama, kata priangan berasal dari kata prayangan yang berarti tulus dan ikhlas yang dikaitkan dengan menyerahnya Pangeran Aria Suriadiwangsa, penguasa Sumedang Larang kepada sultan Mataram Islam. Kedua, kata Priangan terdiri atas kata hiang atau rahiyang yang berarti tempatnya Tuhan. Lihat dalam Mumuh Muhsin Z., *Priangan Dalam Arus Dinamika Sejarah* (Bandung: Unpad Press, 2016), hlm. 19.

<sup>38</sup> Nina H. Lubis, *Kehidupan Kaum Menak Priangan 1800-1942* (Bandung: Pusat Informasi Kebudayaan Sunda, 1998), hlm. 29.

<sup>39</sup> Edi S. Ekadjati dkk, *Sejarah Kebangkitan Nasional Daerah Jawa Barat* (Bandung: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Pusat Penelitian Sejarah dan Budaya, Proyek Penelitian dan Pencatatan Kebudayaan Daerah Jawa Barat, 1979), hlm. 8.

pemimpin yang disebut *prefek*. Salah satu *prefektur* di pulau Jawa ialah prefektur Priangan yang terdiri atas wilayah Bandung, Sumedang, Cianjur dan Parakanmuncang. Wilayah ini dikenal pula sebagai *Prefectuur Preanger-Regentschappen*.<sup>40</sup>

Pada saat pulau Jawa dikuasai oleh pemerintahan Inggris yang berada di bawah kepemimpinan Thomas Stamford Raffles (1811-1816), *prefektur* diganti menjadi keresidenan yang dipimpin oleh seorang residen. Raffles membagi pulau Jawa ke dalam 16 keresidenan.<sup>41</sup> Salah satu diantaranya ialah Keresidenan Priangan dengan pusat pemerintahan di Cianjur. Kabupaten-kabupaten yang ada di Priangan mengalami, reorganisasi hingga pada tahun 1859 menjadi lima kabupaten yaitu Bandung, Cianjur, Sumedang, Limbangan, dan Sukapura. Pada tahun 1864, pusat pemerintahan Keresidenan Priangan dipindahkan ke Bandung, sehingga Bandung menjadi pusat kegiatan ekonomi, politik, dan administrasi keresidenan Priangan.<sup>42</sup>

Pada tahun 1871, tatar sunda dibagi menjadi beberapa keresidenan. Setiap keresidenan terbagi kedalam beberapa kabupaten. Tiap kabupaten yang memiliki wilayah cukup luas biasanya terdiri dari dua *afdeeling*.<sup>43</sup> Berikut merupakan keresidenan yang terdapat di tatar sunda, antara lain:

1. Keresidenan Batavia, terdiri dari 3 afdeling yaitu Meester Cornelis (Jatinegara), Tangerang, dan Buitenzorg (Bogor).

---

<sup>40</sup> Lubis, *Kehidupan Kaum Menak Priangan 1800-1942*, *op.cit.*, hlm. 38.

<sup>41</sup> Nina Herlina Lubis dkk, *Sejarah Provinsi Jawa Barat Jilid 1* (Bandung: Pemerintah Provinsi Jawa Barat, 2011), hlm. 422-424.

<sup>42</sup> Sri Ana Handayani, "Geliat Ekonomi Masyarakat Priangan Era Pemerintahan Hindia Belanda 1900-1942," *Lembaran Sejarah* 13, no. 2 (2017), hlm. 222.

<sup>43</sup> *Afdeeling* diserap dalam bahasa Indonesia menjadi afdeling.

2. Keresidenan Karawang, terdiri dari 3 afdeling yaitu Tanah-tanah Negara, Pamanukan dan Ciasem, dan Tegalwaru.
3. Keresidenan Banten, terdiri dari 4 afdeling yaitu Anyer, Pandeglang, Caringin, dan Lebak.
4. Keresidenan Priangan, terdiri dari 9 afdeling yaitu Cianjur, Sukabumi, Bandung, Cicalengka, Sumedang, Limbangan, Tasikmalaya, Sukapura dan Sukapura Kolot.
5. Keresidenan Cirebon, terdiri dari 4 afdeling yaitu Indramayu, Majalengka, Kuningan, dan Galuh.<sup>44</sup>

Keresidenan Priangan terbagi ke dalam 5 kabupaten yang terbagi ke dalam 9 afdeling yaitu kabupaten Cianjur (afdeling Cianjur dan Sukabumi), kabupaten Bandung (afdeling Bandung dan Cicalengka), kabupaten Sumedang (afdeling Sumedang dan Tasikmalaya), kabupaten Sukapura (afdeling Sukapura dan Sukapura Kolot), dan kabupaten Limbangan.<sup>45</sup>

Setiap kabupaten dipimpin oleh seorang bupati dan setiap afdeling dipimpin oleh seorang asisten residen. Asisten residen dibantu oleh patih afdeling dalam menjalankan pemerintahan. Diberlakukannya sistem afdeling oleh pemerintah kolonial Belanda ialah untuk mengurangi kekuasaan bupati dalam kehidupan masyarakat.<sup>46</sup>

Pemerintah kolonial Belanda kemudian melakukan reorganisasi wilayah Priangan pada tahun 1901. Afdeling Cicalengka dihapuskan serta sebagian

---

<sup>44</sup> Lubis dkk, *Sejarah Provinsi Jawa Barat Jilid 1, op.cit.*, hlm. 428.

<sup>45</sup> *Ibid*, hlm. 440.

<sup>46</sup> *Ibid*, hlm. 429.

wilayahnya digabungkan dengan afdeling Bandung dan sebagian lagi digabungkan dengan afdeling Limbangan. Afdeling Sukapura Kolot dihapuskan serta sebagian wilayahnya digabungkan dengan afdeling Sukapura dan sebagian lagi digabungkan dengan kabupaten Limbangan. Afdeling Tasikmalaya dihapuskan, wilayahnya digabungkan dengan afdeling Sukapura serta ibu kota Sukapura yang mulanya berada di Manonjaya dipindahkan ke Tasikmalaya. Pada tahun 1913, nama Kabupaten Limbangan diganti menjadi Kabupaten Garut dan nama Kabupaten Sukapura diganti menjadi Kabupaten Tasikmalaya. Pada tahun 1915, Kabupaten Galuh menjadi bagian dari Keresidenan Priangan dan diganti menjadi Kabupaten Ciamis.<sup>47</sup>

Priangan merupakan wilayah yang sangat subur karena dikelilingi oleh gunung-gunung berapi seperti Gunung Galunggung, Gunung Gede, Gunung Papandayan, Gunung Tangkuban Parahu dan masih banyak lainnya. Tidak hanya gunung-gunung, wilayah Priangan ini dialiri oleh sungai-sungai. Sungai-sungai besar seperti Citarum, Cisokan, Cimanuk, dan Citanduy menjadi sumber kehidupan bagi keresidenan Priangan. Sungai Cimanuk merupakan sungai yang memiliki peranan cukup penting bagi kehidupan masyarakat di keresidenan Priangan, bahkan sudah dikenal perannya sejak zaman Kerajaan Sunda karena di muara sungai ini terdapat pelabuhan dagang yang cukup ramai. Sungai Citanduy dan Citarum juga memegang peranan penting khususnya dipakai sebagai sarana transportasi pengangkutan kopi dan garam.<sup>48</sup>

---

<sup>47</sup> Lubis, *Kehidupan Kaum Menak Priangan 1800-1942*, *op.cit.*, hlm. 39.

<sup>48</sup> *Ibid*, hlm. 29-30.

Secara umum, terdapat dua tipe desa yaitu dataran rendah dan dataran tinggi. Penduduk yang tinggal di desa dataran rendah biasanya tinggal sepanjang sungai atau jalan dan berbatasan dengan sawah atau ladang. Penduduk yang tinggal di dataran tinggi biasanya selalu berpindah tempat karena mereka mendekati tanah yang subur. Setelah tanah tersebut tidak subur lagi maka mereka meninggalkan tempat tersebut dan mencari tanah baru.<sup>49</sup>

Priangan menjadi salah satu wilayah yang banyak memberikan keuntungan bagi Belanda. Kekayaan sumber daya alam yang dimiliki oleh Priangan membuat Belanda tertarik untuk meraup keuntungan dari wilayah tersebut. Priangan merupakan daerah penghasil kopi dan tanaman ekspor lainnya seperti teh, kina, tebu, nila, dan lain sebagainya. Kopi menjadi komoditi ekspor utama dari wilayah Priangan ini.<sup>50</sup> Jumlah perkebunan yang terdapat di Priangan dapat mencapai 1.440 perkebunan. Pada tahun 1917, luas tanah pertanian di Priangan berjumlah 1.052.644 bau yang didalamnya terdapat 407.566 bau berupa lahan sawah.<sup>51</sup>

## **2.2. Kondisi Sosial-Politik di Priangan Tahun 1918 hingga Tahun 1920**

### **2.2.1. Kondisi Sosial-Politik**

#### **2.2.1.1. Kondisi Sosial**

Kekayaan wilayah Priangan akan sumber daya alamnya membuat masyarakat Priangan menjadi masyarakat agraris. Mata pencaharian mayoritas masyarakat Priangan ialah menjadi petani. Hal penting dalam masyarakat agraris ialah mengenai kepemilikan tanah

---

<sup>49</sup> Muhsin Z., *op.cit.* hlm. 22-23.

<sup>50</sup> Handayani, *op.cit.*, hlm. 222.

<sup>51</sup> Chusnul Hayati, *Peristiwa Cimareme 1919: Perlawanan Haji Hasan Terhadap Pembelian Padi* (Semarang: Penerbit Mimbar, 2000), hlm. 36.

dan pengelolaan tanah. Pada umumnya, kepemilikan tanah di wilayah Priangan merupakan milik perseorangan. Pada perkembangannya, masalah utama dalam pemilikan tanah di Priangan ialah pemilikan tanah luas dan bebas sehingga terjadi penimbunan pemilikan tanah yang dilakukan oleh pegawai pribumi. Dalam cara pengelolaan tanah, biasanya dilakukan dengan cara sistem sewa, bagi hasil, atau sistem upah.<sup>52</sup>

Keadaan masyarakat Priangan ketika berada di bawah pemerintah kolonial Belanda tentunya begitu menderita. Perekonomian masyarakat tergantung pada lahan agraris yang mereka punya. Hal yang menyengsarakan bagi para petani Priangan ialah ketika terdapat beberapa kebijakan yang tidak menguntungkan mengenai pertanian dan perkebunan yang diberlakukan pemerintah kolonial Belanda terhadap petani di Priangan, baik itu dalam sistem sewa tanah, pembelian hasil tani dan sebagainya.

Wilayah Priangan mayoritas dihuni oleh etnis Sunda. Seiring perjalanan waktu, masuk etnis lain seperti Jawa, Bugis, Melayu, Cina, dan Eropa ke wilayah Priangan. Dalam sistem kemasyarakatan, terbentuk pelapisan dalam masyarakat Priangan karena telah dicampuri oleh sistem Barat. Secara umum terdapat 3 tingkatan masyarakat Priangan yaitu *menak* (kelas tinggi), *santana* (kelas menengah) dan *somahan* (kelas bawah). Golongan menak terdiri dari bupati dan

---

<sup>52</sup> *Ibid*, hlm. 39-40.

keluarga bupati. Golongan santana merupakan golongan pejabat pemerintah dibawah bupati. Golongan somah atau somahan kebanyakan dari mereka adalah petani. Terdapat 3 kriteria yang dapat menentukan kedudukan seseorang dalam masyarakat saat itu yaitu, faktor keturunan atau hubungan darah dengan penguasa, posisi seseorang dalam birokrasi pemerintah dan kepemilikan tanah.<sup>53</sup>

Mengenai pendidikan, masyarakat Priangan diberi kesempatan untuk sekolah. Adapun sekolah untuk masyarakat Priangan ialah dimulai dengan sekolah dasar yaitu sekolah kelas satu dan sekolah kelas dua. Pada awal abad 20, pemerintah mengadakan pendidikan menengah umum atau sekolah lanjutan bagi rakyat pribumi yaitu sekolah pertukangan (*ambachtsschool*), sekolah pendidikan calon guru (*kweekschool*). Selain itu terdapat sekolah khusus menak yaitu *hoofdenschool*.<sup>54</sup>

Pada aspek agama, mayoritas masyarakat Priangan memeluk agama Islam serta ada juga yang memeluk agama Kristen namun hanya sedikit sekali. Jumlah masyarakat yang memeluk agama Kristen di Priangan hanya sedikit karena masyarakat Priangan sudah lebih dulu mengenal Islam dan menjadi penganut agama Islam yang taat. Maka ketika para penginjil datang ke Priangan, mereka disambut kurang baik oleh mayoritas masyarakat Priangan dikarenakan kokohnya Islam di

---

<sup>53</sup> Muhsin Z., *op.cit.*, hlm. 50 dan 56.

<sup>54</sup> Nina Herlina Lubis dkk, *Sejarah Provinsi Jawa Barat Jilid 2* (Bandung: Pemerintah Provinsi Jawa Barat, 2011), hlm. 9-11.

Priangan dan teguhnya masyarakat Priangan terhadap Islam. Beberapa wilayah Priangan yang menjadi wilayah Kristianisasi antara lain Bandung, Cianjur dan Sukabumi.

Masyarakat Priangan dikenal sebagai penganut agama Islam yang taat karena sangat kuat dalam mengamalkan ajaran agama Islam. Islam menjadi dasar moral bagi kehidupan masyarakat Priangan. Hal tersebut diyakinkan dengan banyaknya masyarakat Priangan yang menunaikan haji pada akhir abad 19.<sup>55</sup> Dalam perkembangannya, ketika beberapa organisasi berbasis Islam berdiri di Priangan maka mendapat sambutan baik dari masyarakat serta banyak dari masyarakat yang mengikuti organisasi-organisas berbasis Islam tersebut.

### **2.2.1.2 Kondisi Politik**

Birokrasi pemerintahan tradisional wilayah Priangan pada abad ke-19 hingga tahun 1920, setiap kabupaten menjalankan pemerintahan dipimpin oleh seorang bupati (*regent* dalam bahasa Belanda) yang diangkat oleh Gubernur Jenderal atas usul dari Residen serta pertimbangan dari *Adviseur voor Inlandsche Zaken dan Raad van Indie*<sup>56</sup>. Seorang bupati biasanya memiliki juru tulis pribadi. Di bawah bupati, ada jabatan patih yang juga diangkat oleh Gubernur Jenderal. Seorang patih biasanya merupakan kerabat dekat bupati seperti adik, paman, keponakan, dan sebagainya. Tugas patih ialah sebagai

---

<sup>55</sup> *Ibid*, hlm. 55.

<sup>56</sup> *Adviseur voor Inlandsche Zaken dan Raad van Indie* yang berasal dari bahasa Belanda yang berarti Penasehat pribumi dan dewan Hindia.

koordinator dari para bawahan bupati lainnya yang berada di ibu kota kabupaten.<sup>57</sup> Pusat kabupaten juga dipegang oleh *hoofddjaksa* (jaksa kepala) yang menangani urusan polisi dan peradilan dan *hoofdpenghulu* yang menangani urusan keagamaan seperti perkawinan, perceraian dan kematian di ibukota kabupaten. Setiap kabupaten terbagi pula dalam beberapa kewedanaan yang dipimpin oleh seorang wedana.<sup>58</sup>

Sejak adanya kolonialisme dan imperialisme di Hindia Belanda, kondisi rakyat pribumi semakin menderita yang diakibatkan oleh adanya eksploitasi yang dilakukan oleh kolonial Belanda. Hal tersebut kemudian memicu adanya pergerakan-pergerakan untuk melakukan perubahan kepada kehidupan yang lebih baik serta sebagai perlawanan terhadap kebijakan yang dirasa membuat rakyat pribumi semakin menderita.

Pada awal abad 20, diterapkan kebijakan politik etis, yang dimana melahirkan golongan pribumi terpelajar. Para pribumi terpelajar ini kemudian melakukan pergerakan dengan mendirikan organisasi diantaranya Budi Utomo, Sarekat Islam dan lain sebagainya. Beberapa organisasi nasional ini kemudian meluaskan pengaruhnya ke beberapa wilayah salah satunya Priangan. Organisasi Budi Utomo berdiri pada tahun 1908 dan hanya terbatas pada penduduk pulau Jawa

---

<sup>57</sup> Lubis, *op.cit.*, hlm. 42.

<sup>58</sup> *Ibid*, hlm. 45.

dan Madura. Budi Utomo sudah memiliki beberapa cabang di tatar sunda yaitu Bandung, Bogor, Tasikmalaya. Sementara itu, pemuda Sunda Stovia dan beberapa tokoh Sunda yang tinggal di Jakarta mendirikan suatu organisasi yaitu Paguyuban Pasundan pada tahun 1914. Dalam waktu relatif singkat, Paguyuban Pasundan ini tersebar luas ke beberapa wilayah seperti Bandung, Bogor, Tasikmalaya, Sumedang, Cianjur dan lainnya. Selanjutnya, pada tahun 1912, Douwes Dekker dan kawan-kawannya mendirikan suatu organisasi yang dinamai Indische Partij. Indische Partij merupakan organisasi berhaluan politik yang berlandaskan nasionalisme untuk menuju kemerdekaan.<sup>59</sup>

## **2.2.2. Peristiwa-Peristiwa Sosial-Politik di Priangan**

### **2.2.2.1. Sarekat Islam Afdeeling B**

Sarekat Islam merupakan salah satu organisasi massa yang berkembang pesat di Priangan. Sarekat Islam menjadi sorotan Belanda pada awal abad ke 20. Hal tersebut dikarenakan pergerakan Sarekat Islam ini bersifat radikal. Masyarakat Priangan yang turut ikut menjadi anggota Sarekat Islam memegang peranan penting dalam pergerakan melawan kolonial Belanda.

Sarekat Islam merupakan organisasi pergerakan nasional yang berdiri pada tahun 1912. Sarekat Islam bermula

---

<sup>59</sup> Ekadjati dkk, *op.cit.*, hlm. 70-72.

dari suatu organisasi dagang yang didirikan oleh Haji Samanhudi pada tahun 1911 yang bertujuan untuk memajukan perdagangan pribumi dan melawan pedagang Cina. Sarekat Islam ini dipimpin oleh H.O.S Tjokroaminoto. Organisasi ini berkembang secara pesat yang menunjukkan bahwa organisasi ini telah lama dinantikan oleh rakyat karena tujuannya yaitu mencapai kemajuan rakyat yang nyata dilandaskan dengan rasa persaudaraan, persatuan dan tolong menolong diantara kaum Muslimin dan seluruh rakyat.<sup>60</sup>

Sarekat Islam terus melakukan propaganda pada masyarakat pribumi agar pengaruhnya semakin meluas diberbagai daerah. Melihat perkembangan Sarekat Islam yang cukup pesat dan bersikap berani pada pemerintah kolonial sehingga membuat pemerintah kolonial tidak senang dengan adanya Sarekat Islam. Pemerintah kolonial secara yuridis tidak mempunyai alasan untuk melarang Sarekat Islam berdiri, maka pada tanggal 30 Juni 1913, pemerintah kolonial menyatakan keputusan mengakui Sarekat Islam sebagai badan hukum, tetapi tidak secara keseluruhan. Dalam hal ini, pemerintah kolonial hanya memberikan pengakuan badan hukum kepada cabang-cabang Sarekat Islam secara sendiri-sendiri. Setelah lebih dari

---

<sup>60</sup> A.K. Pringgodigdo, *Sejarah Pergerakan Rakyat Indonesia* (Jakarta: Dian Rakyat, 1991), hlm. 4-5.

50 Sarekat Islam daerah berdiri, maka didirikan Centraal Sarekat Islam (CSI) di Surabaya pada tahun 1915 dan diakui sebagai badan hukum oleh pemerintah kolonial pada tanggal 18 Maret 1916.<sup>61</sup> Adapun tujuan didirikannya CSI ini adalah untuk memajukan dan membantu Sarekat Islam daerah serta mengadakan hubungan kerjasama diantaranya.<sup>62</sup>

Pada awalnya propaganda Sarekat Islam dilakukan melalui hubungan pribadi oleh utusan yang dikirim *hoofdbestuur*. Lalu pada awal 1913, surat kabar mulai menyebarkan berita tentang Sarekat Islam. Surat kabar yang menjadi organ S.I. diantaranya surat kabar *Sarotomo*, *Oetoesan Hindia* di Surabaya, *Sinar Djawa* di Semarang, *Kaoem Moeda* di Bandung, dan *Pantjaran Warta* di Batavia.

Sarekat Islam membagi tiga komite untuk departemen Jawa Barat, Jawa Timur dan Jawa Tengah. Semua cabang Sarekat Islam secara formal berada di bawah pimpinan salah satu dari ketiga komite. Meskipun terbagi menjadi tiga wilayah pengaruh, namun sesungguhnya pembagian wilayah *controlling afdeeling* itu tidak terjadi. Di Jawa Barat, Gunawan mengawasi *afdeeling-afdeeling* Sarekat Islam di wilayah

---

<sup>61</sup> Sartono Kartodirdjo, dkk, *Sarekat Islam Lokal* (Jakarta: Arsip Nasional Republik Indonesia, 1975, hal. x).

<sup>62</sup> *Ibid*, hlm. 6-7.

Batavia sedangkan Sarekat Islam Bandung diawasi oleh Suwardi Suryaningrat.

Sarekat Islam telah berhasil memperluas pengaruhnya ke wilayah-wilayah di tatar Sunda khususnya Priangan. Pada tahun 1912, terbentuk Sarekat Islam cabang Bandung yang memiliki ranting cabang di Majalaya, Paseh, Ujungberung, dan Ciparay. Pada tahun 1914 telah berdiri Sarekat Islam. cabang Tasikmalaya, Ciamis, Garut, Sukabumi.<sup>63</sup> Keberhasilan Sarekat Islam meluaskan pengaruhnya ke pelosok daerah membuktikan bahwa gerakan Sarekat Islam ini sangat masif dan bertujuan memperjuangkan kondisi rakyat pribumi.

Sarekat Islam di Priangan dirintis oleh S. Goenawan, Abdul Moeis, dan R. Wignjadisastra. Kehadiran Sarekat Islam di Priangan disambut gembira oleh masyarakat kelas menengah. Pada tahun 1914, Sarekat Islam di Priangan berjumlah puluhan ribu orang. Sarekat Islam cabang Garut sudah berjumlah 10.000 orang. Begitu pula dengan kondisi di Tasikmalaya, Ciamis dan Banjar.<sup>64</sup>

Alasan Sarekat Islam dapat diterima dengan baik di Priangan karena dari faktor agama dan sikap Sarekat Islam sendiri. Sejak dulu, masyarakat Priangan terkenal sebagai

---

<sup>63</sup> Ekadjati dkk, *op.cit.*, hlm. 76.

<sup>64</sup> Salam dkk, *op.cit.*, hlm. 13

penganut agama Islam yang taat sehingga Sarekat Islam mudah berkembang di Priangan. Selain itu juga, adanya persamaan pandangan dan cita-cita hidup masyarakat dengan Sarekat Islam.

Seiring berjalannya waktu *afdeeling-afdeeling* Sarekat Islam di wilayah Priangan seperti Sukabumi, Majalaya dan Tasikmalaya bergerak secara radikal menunjukkan intervensi kepada penguasa setempat.<sup>65</sup> Kekecewaan yang dirasakan oleh masyarakat terhadap penguasa tempat membuat Sarekat Islam melakukan perlawanan dan pergerakan.

Pada tahun 1918, beberapa pimpinan Sarekat Islam ranting Majalaya ditahan oleh penguasa setempat karena dituduh telah memaksa masyarakat untuk menjadi anggota dari Sarekat Islam. Melihat kejadian tersebut, pimpinan CSI yaitu H.O.S Tjokroaminoto langsung pergi ke Majalaya untuk menangani permasalahan yang terjadi.<sup>66</sup> Adanya kerusuhan di Majalaya diketahui dari laporan Haji Djaelani kepada patih Bandung bahwa Haji Djaelani mengaku telah dipaksa untuk ikut menjadi anggota Sarekat Islam kemudian disekap di rumahnya oleh beberapa orang dari Sarekat Islam Majalaya.<sup>67</sup>

---

<sup>65</sup> Shiraisi, *op.cit.*, hlm. 93.

<sup>66</sup> Ekadjati dkk, *op.cit.*, hlm. 77-78.

<sup>67</sup> Kartodirdjo et.al., *op.cit.*, hlm. 76.

Selain itu, di wilayah Priangan juga telah berdiri Sarekat Islam *afdeeling* B yang memulai kegiatannya pada tahun 1918 setelah diselenggarakannya kongres Sarekat Islam di Tasikmalaya. Sarekat Islam *afdeeling* B diketuai oleh Haji Ismail dari Sarekat Islam cabang Manonjaya. Pada bulan Januari 1919, diadakan pertemuan tahunan Sarekat Islam Manonjaya yang didalamnya membahas bahwa Sosrokardono selaku sekretaris dari CSI menyetujui adanya gerakan itu dan sejak saat itu Sarekat Islam *afdeeling* B memperluas gerakannya di daerah Priangan.<sup>68</sup>

Gerakan *afdeeling* B bersifat rahasia sebelum diungkapnya peristiwa Cimareme. *Afdeeling* B merupakan gerakan rahasia yang dipersiapkan untuk melawan kekuasaan kolonial dengan melalui perang jihad dan dibentuk dengan tujuan sebagai benteng bagi Sarekat Islam terhadap segala pengaruh dari luar. Selain itu juga bertujuan untuk tetap setia menjalankan peraturan agama Islam yang kuat. Gerakan rahasia ini juga ingin menggulingkan kekuasaan penjajah dan memerdekakan bangsa pribumi.<sup>69</sup>

Munculnya gerakan *afdeeling* B disebabkan oleh dominasi politik kolonial Barat yang mengakibatkan

---

<sup>68</sup> Hayati, *op.cit.*, hlm.134-135.

<sup>69</sup> Salam dkk, *op.cit.*, hlm. 33.

perekonomian merosot serta penindasan politik. Keadaan ini tentunya membuat rakyat pribumi hidup menderita dan sengsara yang menimbulkan keresahan bagi rakyat pribumi. Keresahan yang dialami rakyat pribumi kemudian menimbulkan lahirnya gerakan sosial untuk melakukan perlawanan terhadap para penguasa yang bersikap sewenang-wenang, salah satunya muncul gerakan *afdeeling* B.

Kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh *afdeeling* B ialah menghimpun para kiayi, guru dan santri di Priangan untuk bergabung dalam keanggotaan *afdeeling* B. Hal tersebut dilakukan dengan penjualan jimat dan pelaksanaan sumpah rahasia. Pada umumnya yang membeli jimat harus merupakan anggota Sarekat Islam. Jimat ini dipercaya memiliki kekebalan dan dapat melindungi seseorang dari kejahatan.<sup>70</sup> Perekrutan anggota Sarekat Islam *afdeeling* B ini dilakukan sesuai dengan ajaran tarekat. Anggota yang ingin masuk Sarekat Islam *afdeeling* B diambil sumpah dengan cara *tawajjuh*.<sup>71</sup>

Anggota-anggota *afdeeling* B terdapat di Tasikmalaya, Ciamis, Bandung, Banjar, Sumedang, Garut dan Sukabumi. Gerakan ini memiliki jaringan yang luas, diperkirakan anggota Sarekat Islam *afdeeling* B di wilayah Priangan berjumlah

---

<sup>70</sup> Hayati, *op.cit.*, hlm. 137.

<sup>71</sup> Salam dkk, *op.cit.*, hlm. 37.

ribuan orang namun tidak semua anggota Sarekat Islam di Priangan menjadi anggota dari gerakan *afdeeling* B ini.<sup>72</sup>

Gerakan ini melakukan pemberontakan dengan perang sabil untuk mencapai tujuannya yaitu menggulingkan kekuasaan penjajah. Penentuan sasaran dan waktu pemberontakan ditentukan oleh Goena Perlaja yaitu dewan yang terdiri dari 13 orang untuk memutuskan kebijakan penting. Goena Perlaja akan memberikan perintah dengan kode rahasia kepada anggotanya untuk bergerak ke tempat sasaran yang telah ditentukan.<sup>73</sup> Perkumpulan ini diperkirakan ada kaitannya dengan beberapa tokoh seperti Surjopranojo, Semaoen, Abdoel Moeis dan Moh. Sanoesi. Moh. Sanoesi disebut-sebut menjadi pemimpin perhimpunan Goena Perlaja di Bandung yang menjadi satu kesatuan dengan *afdeeling* B.<sup>74</sup>

Rencana pemberontakan Sarekat Islam *afdeeling* B ini gagal karena beberapa tokohnya terjebak di peristiwa Cimareme. Beberapa tokoh Sarekat Islam *afdeeling* B berniat ingin menolong Haji Hasan namun gerak gerik *afdeeling* B di Garut terbongkar oleh pemerintah. Gerakan ini sangat tertutup dan rahasia sehingga data-data yang ditemukan terbatas. Tokoh Sarekat Islam *afdeeling* B yang terbongkar karena adanya

---

<sup>72</sup> *Ibid*, hlm. 33.

<sup>73</sup> *Ibid*, hlm. 37-38.

<sup>74</sup> *Kaoem Moeda*, 10 Februari 1920.

peristiwa Cimareme hanya sebagian kecil dari keseluruhan anggota Sarekat Islam *afdeeling* B di wilayah Priangan.<sup>75</sup>

#### **2.2.2.2. Peristiwa Cimareme**

Peristiwa Cimareme merupakan salah satu peristiwa penting yang menandai adanya dinamika sosial-politik di Priangan awal abad ke-20 khususnya wilayah Garut. Pada tahun 1914, berdiri salah satu organisasi pergerakan yaitu Sarekat Islam di Garut. Terdapat beberapa wilayah ranting Sarekat Islam di Garut diantaranya Malangbong, Tarogong, Leles, Bojong Salam, Sadang, Tanggulun, Margawati, Cikujang, Pamengpeuk, Nangkaruka dan Cimareme. Pimpinan dari Sarekat Islam di Cimareme ialah Haji Gojali, menantu dari Haji Hasan Arif.<sup>76</sup>

Haji Hasan Arif merupakan tokoh agama terkemuka di wilayah Cimareme yang amat menentang adanya kolonialisme Belanda. Haji Hasan juga seorang pimpinan pesantren yang memiliki murid cukup banyak. Haji Hasan juga merupakan anggota perhimpunan Goena Perlaja yang merupakan sentral dari berbagai gerakan revolusioner yang tujuannya sama dengan S.I. *Afdeeling* B.<sup>77</sup> Hal wajar bila pemerintah kolonial

---

<sup>75</sup> Salam dkket, *loc.cit.*

<sup>76</sup> Sutrisno Kutoyo, *Haji Hasan Arif: Riwayat Hidup Dan Perjuangannya* (Jakarta: Proyek Inventarisasi dan Dokumen Sejarah Nasional Direktorat Sejarah dan Nilai Tradisional Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1984), hlm. 14.

<sup>77</sup> Hayati, *op.cit.*, hlm. 72.

mencurigai Haji Hasan karena memiliki pengaruh besar di masyarakat dan memiliki hubungan dengan perkumpulan tersebut.

Perang Dunia I (1914-1918) menyebabkan terjadinya krisis ekonomi di berbagai negara di dunia salah satunya di tanah jajahan Belanda yaitu Hindia Belanda. Menjelang meletusnya Perang Dunia I pada tahun 1914, kehidupan rakyat pribumi Hindia Belanda semakin merosot. Harga kebutuhan hidup semakin meroket tajam seperti harga beras sedangkan penghasilan yang didapatkan semakin menurun. Rakyat pribumi semakin mengalami kesengsaraan ketika ditetapkannya kebijakan membayar pajak yang semakin tinggi. Pada tahun 1914-1916, pajak mulanya bertarif sekitar *f* 1.00 (satu *gulden*) kemudian dinaikan menjadi *f* 2.30 (dua *gulden* tiga puluh sen) dengan catatan bahwa kerja rodi ditiadakan namun dalam kenyataannya kerja rodi tetap berjalan.<sup>78</sup>

Kisaran tahun 1918-1919 terjadi kegagalan panen sehingga mengakibatkan kondisi pangan semakin memburuk. Rakyat pribumi semakin sengsara hingga terjadi kelaparan dan kemiskinan. Dalam mengatasi permasalahan tersebut, pemerintah kolonial Belanda kemudian mengeluarkan peraturan penyerahan wajib yaitu wajib jual padi bagi para

---

<sup>78</sup> Kutoyo, *op.cit.*, hlm. 10.

petani. Peraturan ini menyebabkan para petani harus menjual sebagian padinya kepada pemerintah.<sup>79</sup> Pada tanggal 26 Maret 1919, Residen Priangan mengirim surat mengenai peraturan wajib jual padi kepada seluruh asisten residen. Pada bulan April 1919, para asisten residen menyampaikan peraturan tersebut kepada para bupati dan para bupati menyampaikan kepada para wedananya. Peraturan ini akhirnya diberlakukan juga di salah satu wilayah Priangan yaitu Kampung Cimareme, Desa Cikendal. Kawedanaan Leles, Garut.<sup>80</sup>

Peraturan wajib jual padi didasarkan atas luas sawah yang dimiliki oleh setiap petani. Pada bulan April 1919, lurah Cikendal diperintah oleh wedana Leles untuk menyampaikan peraturan wajib jual padi bagi masyarakat yang memiliki sawah lebih dari satu bau. Setiap petani yang memiliki sawah seluas 1-2 bau harus menjual 1 pikul, sawah seluas 2-3 bau harus menjual 2 pikul, sawah seluas 3-4 bau harus menjual 3 pikul dan seterusnya. Harga padi yang ditetapkan oleh pemerintah ialah f 4.50 tiap pikul.<sup>81</sup> Harga yang ditetapkan pemerintah rupanya lebih rendah dari harga umum di pasaran. Harga padi di Priangan waktu itu sekitar f 7.50 tiap pikul.<sup>82</sup>

---

<sup>79</sup> *Ibid*, hlm. 10-11.

<sup>80</sup> Hayati, *op.cit.*, hlm. 57.

<sup>81</sup> *Kaoem Moeda*, 24 Januari 1920.

<sup>82</sup> Hayati, *op.cit.*, hlm. 59.

Peraturan wajib jual padi dirasa tidak adil bagi para petani karena kondisi petani sedang mengalami kemerosotan ekonomi. Diterapkannya peraturan tersebut menimbulkan berbagai reaksi khususnya dari rakyat pribumi Garut yaitu Haji Hasan Arif. Ia kontra terhadap peraturan wajib jual padi yang dilakukan oleh pemerintah kolonial Belanda. Haji Hasan, diwajibkan menjual 40 pikul<sup>83</sup> (2500 kg) dari sawahnya yang memiliki luas 10 bau<sup>84</sup> dengan penghasilan sekitar 250 pikul (15.625 kg) setiap panen. Haji Hasan Arif mengajukan keberatan atas jumlah yang ditetapkan oleh pemerintah karena hasil sawah tersebut digunakan untuk kehidupan keluarganya yang berjumlah banyak serta orang-orang yang bergantung hidup pada Haji Hasan. Haji Hasan hanya menyanggupi 10 pikul saja.<sup>85</sup>

Bagi rakyat umumnya, petani biasanya hanya memiliki sawah seluas 200 bata dengan hasil 1.000 kg padi dan biaya penggarapan 300 kg, jadi yang tersisa hanya 700 kg. Dengan hasil 700 kg, petani harus mencukupi kebutuhan keluarganya. Jika pemerintah memaksakan peraturan wajib jual padi maka petani harus menyetor 100 kg dan sisanya hanya 600 kg untuk

---

<sup>83</sup> 1 pikul = 62,5 kg.

<sup>84</sup> 1 bau = 7000 m<sup>2</sup> atau 500 bata.

<sup>85</sup> *Ibid*, hlm. 73; *Kaoem Moeda*, 31 Januari 1920.

keperluan hidupnya. Hal tersebut tentunya menyengsarakan petani.<sup>86</sup>

Wedana Leles mendatangi Haji Hasan untuk menjelaskan peraturan wajib jual padi. Haji Hasan tetap menolak menjual 40 pikul padi dan hanya ingin menjual padinya sebanyak 10 pikul. Haji Hasan juga menjelaskan kepada Wedana bahwa kehidupan petani sudah terlalu sulit sedangkan penghasilan yang didapat tidak dapat ditingkatkan. Dengan kata lain, Haji Hasan ini membela petani dan menolak keras adanya peraturan wajib jual padi. Mendengar hal itu dari Haji Hasan, Wedana menolaknya dengan sikap kasar dan mengancam akan mendatangkan pejabat pemerintah, pasukan polisi serta menyita sawahnya.<sup>87</sup>

Melihat reaksi wedana yang bersikap seperti itu, membuat Haji Hasan menyadari bahwa keadaan sudah cukup gawat. Oleh karena itu, pada tanggal 24 April 1919, Haji Hasan mengirim surat permohonan kepada asisten residen untuk mempertimbangkan lagi ketetapan menjual padi 40 pikul. Surat permohonan tersebut baru disampaikan Bupati pada tanggal 10 Mei 1919 dan asisten residen tetap menolak permohonan Haji Hasan. Asisten residen memerintahkan wedana Leles untuk

---

<sup>86</sup> Kutoyo, *op.cit.*, hlm. 36.

<sup>87</sup> Hayati, *op.cit.*, hlm. 74.

menyampaikan keputusan itu kepada Haji Hasan namun hal tersebut tidak dilakukan.<sup>88</sup>

Dua bulan berikutnya antara tanggal 18 dan 20 Juni 1919 Wedana Leles mendengar kabar bahwa Haji Hasan tetap tidak ingin menjual padinya sesuai dengan ketetapan pemerintah. Sekitar tanggal 20-24 Juni 1919, wedana Leles juga mendengar kabar bahwa Haji Hasan telah mengumpulkan pasukan untuk melawan orang yang akan mengambil padinya secara paksa. Pada tanggal 25 Juni, wedana Leles melaporkan kepada bupati Garut bahwa Haji Hasan tetap tidak ingin menjual padinya sesuai ketetapan pemerintah dan sedang mempersiapkan diri untuk melakukan perlawanan kepada pemerintah. Setelah itu, pada tanggal 2 Juli 1919, Bupati mengirim surat kepada Asisten Residen yang berisi tentang Haji Hasan yang melawan peraturan pemerintah harus ditindak dengan kekerasan. Pada tanggal 3 Juli 1919, asisten residen memutuskan untuk menangkap Haji Hasan pada esok hari dibantu oleh *politie dinaar* (polisi bersenjata).<sup>89</sup>

Pada hari Jumat 4 Juli 1919, asisten residen, bupati Garut, kontrolir dan 20 polisi pergi ke Cimareme untuk bertemu dengan Haji Hasan. Wedana Leles pun turut bergabung dalam

---

<sup>88</sup> *Ibid*, hlm. 75-76.

<sup>89</sup> *Ibid*, hlm. 78.

rombongan. Pada hari itu, rakyat berduyun-duyun pergi ke rumah Haji Hasan untuk melihat keadaan yang terjadi. Dalam pertemuan tersebut, Bupati menjelaskan mengenai peraturan wajib jual padi namun Haji Hasan tetap mengajukan keberatannya akan peraturan itu. Permohonan Haji Hasan tetap tidak ditanggapi oleh pejabat pemerintah. Asisten residen merasa dikepung oleh pasukan Haji Hasan yang cukup banyak dengan memakai baju putih dan beberapa membawa golok karena telah diselenggarakan shalat Jumat di masjid dekat rumah Haji Hasan. Keadaan tersebut menyiratkan bahwa Haji Hasan telah siap melakukan perlawanan sehingga membuat asisten residen beserta rombongan meninggalkan rumah Haji Hasan. Setelah kepulangan rombongan dari rumah Haji Hasan, situasi Cimareme semakin genting.<sup>90</sup>

Pada malam harinya setelah kedatangan rombongan pejabat pemerintah, kepala desa Pesanggrahan datang ke rumah Haji Hasan bersama sekitar ratusan anggota Sarekat Islam Garut salah satunya ialah Haji Adrai seorang *adviseur afdeeling* B dengan tujuan untuk membantu Haji Hasan dalam melakukan perang sabil. Setiap orang sudah memakai baju putih, jimat dan golok. Dalam hari yang sama, Haji Adrai meminta dukungan tokoh *afdeeling* B Tasikmalaya dan Ciamis serta anggota-

---

<sup>90</sup> *Ibid*, hlm. 80.

anggota *afdeeling* B lainnya dari Ciamis dan Tasikmalaya agar datang ke Cimareme.<sup>91</sup>

Pemerintah Belanda segera mengambil keputusan untuk menumpas gerakan Haji Hasan. Asisten residen meminta residen untuk mengirimkan pasukan militer. Pada hari Senin, 7 Juli 1919, rombongan penangkapan Haji Hasan yaitu patih Garut, Wedana, kepala penghulu, serta 40 polisi Belanda datang ke Cimareme.<sup>92</sup> Sesampainya di rumah Haji Hasan, Patih Garut memerintahkan untuk memanggil Haji Hasan yang sedang berada di dalam rumah. Haji Hasan kemudian keluar diikuti oleh Haji Gadjali dan sekitar 13 orang lainnya di depan rumah. Bupati mengajak Haji Hasan pergi ke Garut untuk membicarakan permasalahan pembelian padi namun Haji Hasan memilih masuk ke dalam rumah. Di dalam rumah, Haji Hasan dan keluarganya berdzikir bersama. Bupati terus menyuruh Haji Hasan untuk keluar rumah namun tetap diabaikan. Mereka mengancam jika Haji Hasan tidak segera keluar maka akan ditembak mati. Haji Hasan tetap berdiam diri di rumah dan berdzikir. Para pejabat pemerintah sudah habis kesabarannya sehingga menyuruh untuk mulai menembakkan pelurunya ke atas atap, namun tetap tidak ada jawaban dari

---

<sup>91</sup> Salam dkk, *op.cit.*, hlm. 42.

<sup>92</sup> Hayati, *op.cit.*, hlm. 86.

dalam rumah. Setelah ke tiga kali tembakan, mereka mendobrak masuk kerumah dan melihat Haji Hasan sudah meninggal.<sup>93</sup>

Setelah Haji Hasan meninggal karena ditembak, pasukan pemerintah kolonial Belanda melakukan pemeriksaan di rumah Haji Hasan dan menangkap para pengikutnya dan dibawa ke Garut untuk diadili. Peristiwa Cimareme ini telah menyebabkan 7 orang gugur, 22 orang luka-luka dan 33 orang ditawan.<sup>94</sup>

Dalam penyelidikan peristiwa ini, pemerintah setempat menemukan adanya organisasi rahasia Sarekat Islam yaitu Sarekat Islam *afdeeling* B. Dengan ditemukannya fakta tersebut, aparat pemerintah langsung bergerak menyelidiki kehadiran Sarekat Islam di seluruh Jawa khususnya Priangan. Sarekat Islam Garut memutuskan untuk membubarkan diri, namun penangkapan-penangkapan keterlibatan anggota SI *afdeeling* B tetap dilakukan hingga akhirnya banyak Sarekat Islam di Priangan yang membubarkan diri.<sup>95</sup>

### **2.2.2.3 Gerakan Serikat Sekerja**

Adanya pergerakan politik yang dilakukan oleh organisasi-organisasi politik pada awal abad 20 memberikan

---

<sup>93</sup> *Ibid*, hlm. 90-94.

<sup>94</sup> Kutoyo, *op.cit.*, hlm. 50-51.

<sup>95</sup> Shiraisi, *op.cit.*, hlm. 153.

pengaruh besar terhadap tumbuhnya pergerakan kaum buruh yang bertujuan untuk memperbaiki kedudukannya. Adapun faktor yang menyebabkan adanya pergerakan dari kaum buruh ialah adanya perkumpulan-perkumpulan politik yang membuka pikiran kaum buruh lebih terbuka untuk berorganisasi, mengikuti perkumpulan buruh bangsa Eropa untuk melihat tatacara dalam bekerja, merosotnya penghasilan yang didapat dan keinginan orang-orang politik mendekati kaum buruh untuk menyokong aksinya dengan mempergunakan sarekat sekerja.<sup>96</sup>

Dampak dari perang Dunia I mengakibatkan perekonomian Hindia Belanda menjadi merosot. Harga kebutuhan hidup menaik tajam sementara upah buruh tidak ikut naik bahkan upah buruh diturunkan oleh perusahaannya. Karena hal tersebut, terjadi aksi-aksi mogok kerja. Isu pemogokan yang diangkat ialah mengenai upah, tunjangan serta penyelesaian permasalahan tentang buruh dan majikan.<sup>97</sup>

Pada akhir 1917 dan awal 1918, Semaun anggota Sarekat Islam berhasil memimpin pemogokan di Semarang. Pemogokan pertama dilakukan oleh buruh pabrik dan perabotan. Keberhasilan pemogokan ini memberikan contoh

---

<sup>96</sup> Pringgodigdo, *op.cit.*, hlm. 18.

<sup>97</sup> Sazalil Kirom, "Buruh Dan Kekuasaan: Dinamika Perkembangan Gerakan Serikat Pekerja Di Indonesia (Masa Kolonial-Orde Lama)," *AVATARA, e-Journal Pendidikan Sejarah* 1, no. 1 (2013), hlm. 12.

bagaimana mengorganisir serikat buruh dan pemogokan. Tidak lama kemudian, menyusul pemogokan lainnya oleh buruh cetak yang dipimpin oleh Vakgroep SI Semarang dan pemogokan itu juga berhasil. Lalu pemogokan diadakan oleh buruh perusahaan mesin jahit Singer, buruh bengkel mobil, serta buruh transportasi kapal uap dan perahu. Pemogokan demi pemogokan menyusul di Batavia, Surabaya, Bandung, dan kota-kota lain.<sup>98</sup>

Beberapa serikat buruh yang berdiri pada awal abad 20 antara lain, beberapa VSTP (Vereniging van Spoor en Tramweg personeel), PGHB (Perserikatan Goeroe Hindia Belanda), PPPB (Perserikatan Pegawai Pegadaian Bumiputera), VIPBOW (Vereeniging Inlandsch Personeel Burgerlijke Openbare Werken), PFB (Personeel Fabriek Bond), HAB (Havensarbeidersbond), PBT (Perserikatan Boeroeh Tjitak), SPPH (Sarekat Pegawai Pelikan Hindia), Chauffeursbond, Sarekat Postel, PPDH (Perserikatan Pegawai Dinas Hutan).<sup>99</sup>

Perkumpulan sarekat buruh atau sarekat sekerja diawali dengan berdirinya V.S.T.P. (Vereniging van Spoor en Tramweg personeel) pada tahun 1908 di Semarang untuk semua pegawai kereta api dan trem. Didirikan oleh 63 pegawai Eropa dari 3

---

<sup>98</sup> Shiraisi, *op.cit.*, hlm. 140.

<sup>99</sup> *Ibid*, hlm. 148.

perusahaan kereta api swasta yang berada di Semarang.<sup>100</sup> Perkumpulan ini cukup berkembang dilihat dari perkembangan anggota yang selalu bertambah pada setiap tahunnya. Anggota dari V.S.T.P. terdiri dari orang Eropa dan orang Indonesia. Pada akhir tahun 1912, memiliki jumlah anggota sebanyak 1.242 anggota. Pada awal tahun 1915, jumlah anggota sebanyak 2.292 anggota hingga tahun 1920 anggotanya mencapai 6.949 anggota dan telah berdiri 93 cabang di Jawa dan beberapa cabang di daerah Sumatera.<sup>101</sup> Pada tahun 1920 telah terjadi pemogokan dalam perusahaan kereta listrik Probolinggo, perusahaan kereta listrik Malang dan perusahaan kereta Cirebon.<sup>102</sup>

Pada tahun 1912, perkumpulan ini dinamakan P.G.H.B. (Persatuan Guru Hindia Belanda) dan berpusat di Yogyakarta. Perkumpulan ini bertujuan untuk memberikan dukungan kepada keluarga khususnya dalam hal kematian anggota keluarganya.<sup>103</sup> P.G.H.B. kemudian tersebar ke beberapa wilayah salah satunya Priangan. Pada tahun 1920 di Tasikmalaya telah dilaksanakan perkumpulan untuk membahas pendirian P.G.H.B di Tasikmalaya.<sup>104</sup>

---

<sup>100</sup> John Ingleson, *Perkotaan, Masalah Sosial & Perburuhan Di Jawa Masa Kolonial* (Depok: Komunitas Bambu, 2013), hlm 33.

<sup>101</sup> *Ibid*, hlm. 35-36.

<sup>102</sup> *Ibid*, hlm. 43.

<sup>103</sup> Pringgodigdo, *op.cit.*, hlm.18.

<sup>104</sup> *Sora Merdika*, 8 Desember 1920

Pada tahun 1916, pegawai pribumi dan jawatan pegadaian mendirikan P.P.P.B. (Perserikatan Pegawai Pegadaian Bumiputera) yang kemudian berada dibawah Sarekat Islam. P.P.P.B kemudian tersebar ke beberapa wilayah salah satunya Priangan. P.P.P.B di Priangan dipimpin oleh Moh. Sanoesi hingga Moh. Sanoesi dipenjara pada bulan Agustus 1920.<sup>105</sup> Beberapa P.P.P.B. tersebar di Bandung, Tasikmalaya, Garut. Pada tahun 1920, Pegadaian Tasikmalaya memiliki 28 pegawai namun hanya 14 pegawai Pegadaian Tasikmalaya yang tetap menjadi anggota dari P.P.P.B, sedangkan 9 pegawai lainnya keluar karena dipengaruhi oleh Natasudira dan Hardjawinata yang pro terhadap pemerintah kolonial, serta sisa pegawai lainnya belum mengikuti keanggotaan P.P.P.B.<sup>106</sup>

Pada tahun 1919, berdiri suatu perkumpulan buruh pabrik yaitu P.F.B (Personeel Fabriek Bond). Didirikannya perkumpulan ini bertujuan untuk memberi pertolongan kepada keluarga buruh pabrik di Yogyakarta yang kemudian tersebar ke seluruh Jawa.<sup>107</sup> Surjopranoto merupakan pendiri P.F.B

---

<sup>105</sup> *Sora Merdika*, 21 September 1920.

<sup>106</sup> *Sora Merdika*, 7 Agustus 1920.

<sup>107</sup> Pringgodigdo, *op.cit*, hlm. 94.

dibantu oleh Tjokroaminoto, Abdoel Moeis dan Agus Salim dalam kepemimpinannya.<sup>108</sup>

Kongres P.P.P.B. yang diselenggarakan di Bandung pada dan bulan Mei 1919 dipimpin oleh Sosrokardono, hasilnya memuat untuk menganjurkan semua perkumpulan buruh dijadikan satu federasi dalam satu badan sentral. Hal tersebut terealisasi pada akhir bulan Desember 1919 di Yogyakarta didirikanlah suatu federasi serikat kerja dengan nama yang diusulkan oleh Sarekat Islam yaitu Persatuan Pergerakan Kaum Buruh (P.P.K.B).<sup>109</sup>

Setelah tahun 1919, kemudian terjadi beberapa pemogokan dan percobaan pemogokan, Sebagian pemogokan dilakukan di luar campur tangan P.P.K.B. Keadaan pada tahun tersebut sangat menyokong timbulnya pemogokan, yang dimana kaum modal memiliki keuntungan yang sangat besar sedangkan upah kaum buruh sangat turun, sehingga hal tersebut menyebabkan adanya pemogokan dari serikat buruh.<sup>110</sup>

Percobaan pemogokan mulai dilakukan oleh anggota-anggota P.F.B. (Personeel Fabriek Bond) pada bulan Mei 1920 di Yogyakarta dengan menuntut penguasa dan pengurus perusahaan kebun dan pemilik gula agar mengakui P.F.B.

---

<sup>108</sup> Deliar Noer, *Gerakan Moderen Islam Di Indonesia 1900-1942* (Jakarta: LP3ES, 1982), hlm. 135.

<sup>109</sup> Pringgodigdo, *op.cit.*, hlm.20.

<sup>110</sup> Pringgodigdo, *loc.cit.*

sebagai badan perwakilan kaum buruh dan meminta untuk menaikkan upah para pegawai.<sup>111</sup>

Terjadi pula pemogokan di wilayah Priangan yaitu Bandung oleh pegawai percetakan pada tanggal 17 Agustus 1920. Hal ini terjadi karena gaji yang diterima oleh pegawai dirasa kurang untuk memenuhi kebutuhan hidup. 6 pegawai percetakan di firma Visseur Bandung melakukan pemogokan dengan cara tidak ada yang masuk kerja.<sup>112</sup>

---

<sup>111</sup> *Ibid.*

<sup>112</sup> *Sora Merdeka*, 2 September 1920.